

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang Undang No 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran tercantum bahwa pendidikan dokter harus dapat menjangkau daerah terpencil, terdepan/ terluar, tertinggal, perbatasan atau kepulauan (DTPK) dan pemerintah wajib mendukung Program Dokter layanan Primer di seluruh wilayah Indonesia yang akan ditempati oleh lulusan pendidikan dokter.

Saat ini pelayanan kesehatan dasar sudah semakin mudah diakses oleh masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di tiap desa, terjaminnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat ekonomi rendah di FKTP dan rumah sakit oleh pemerintah. Namun masih terdapat beberapa masalah diantaranya akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di beberapa wilayah di Indonesia, masih terbatasnya sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kerja di Daerah Tertinggal Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan kondisi geografis yang sulit serta masih terbatasnya sarana transportasi dan infrastruktur.

Kualitas tenaga kesehatan juga masih rendah, pengembangan karir belum berjalan, sistem penghargaan dan sanksi belum sebagaimana mestinya. Masalah kurangnya tenaga kesehatan baik jumlah, jenis dan

distribusinya menimbulkan permasalahan pada rujukan dan penanganan pasien untuk kasus tertentu. Promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat sesuai dengan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS). Di samping itu, gerakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) belum sepenuhnya efektif, terbukti dari angka capaian Posyandu dan Poskesdes yang masih di bawah standar. Sehingga secara umum upaya kesehatan belum cukup berhasil untuk menginisiasi dan meningkatkan PHBS, dan pada akhirnya mengakibatkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat dibuktikan dari tingginya angka kesakitan masyarakat.

Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa pendidikan dokter harus dapat mengatasi universal coverage. Universal coverage didefinisikan bahwa semua orang yang membutuhkan dipastikan dapat menggunakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif dengan kualitas yang cukup memadai, juga memastikan bahwa penggunaan layanan ini tidak dibebani dengan kesulitan keuangan. Untuk itu perlu suatu kebijakan dan kurikulum yang berbasis terhadap kualitas outcome dari mahasiswa akan berimplikasi pada tercapainya pemerataan dokter di layanan primer dan dapat mencapai universal coverage. Saat ini sedang berkembang Academic Health Center (Tim RSP Ditjen Dikti 2013).

AHC atau Academic Health Center adalah organisasi fungsional yang merupakan gabungan fungsi pendidikan, fungsi penelitian dan fungsi pelayanan kesehatan dari berbagai intitusi kesehatan. AHC terintegrasi dari berbagai institusi diantaranya University Community, Teaching Hospital dan Practice Plan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah (Association of Academic Health Centers). University Community adalah istilah untuk perguruan tinggi dimana terdapat komunitas pendidikan tinggi ilmu kesehatan dan kedokteran bergelar pada tingkat sarjana. Teaching Hospital (rumah sakit pendidikan) adalah pendidikan tinggi ilmu kesehatan dan kedokteran klinik bergelar pada tingkat pendidikan profesi kesehatan atau profesi kedokteran. Practice Plan adalah perencanaan penempatan lulusan profesi kesehatan dipimpin oleh seorang ketua practice plan dengan anggota para pengguna lulusan (user) di organisasi-organisasi pelayanan kesehatan di daerahnya.

AHC merupakan organisasi fungsional dari lembaga pendidikan fakultas kedokteran dan kedokteran gigi, fakultas gizi, farmasi, poliklinik kesehatan yang terakreditasi dan semua fakultas tersebut memiliki hubungan dengan rumah sakit pendidikan. Academic Health Center menyelenggarakan koordinasi penelitian, pelayanan dan pendidikan kesehatan baik preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif yang terpadu

di semua tingkatan, mulai pendidikan dasar kesehatan, pendidikan profesi sampai komunitas dalam suatu sistem pelayanan kesehatan yang holistik.

AHC ini memiliki konsep integrasi antara system kesehatan nasional, wahana pendidikan klinik, dan system pendidikan tinggi nasional (tridarma perguruan tinggi). Sehingga ketika semua nya dapat terintegrasikan dengan berbasis konsep AHC maka dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di masyarakat.

AHC di Indonesia belum banyak dikembangkan di pendidikan dokter. Beberapa universitas yang sudah mulai mengembangkan konsep AHC ini diantara nya adalah Universitas Hasannudin dan Universitas Gajah Mada. Di Indonesia konsep AHC ini juga merupakan integrasi dari University Community, Teaching Hospital dan Practice Plan. Di Indonesia yang berfungsi sebagai practice plan adalah pemerintah khususnya dinas kesehatan dan dinas pendidikan dan kebudayaan. Konsep AHC yang akan dikembangkan di Indonesia adalah AHC adalah organisasi fungsional gabungan fungsi pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan dari berbagai Intitusi kesehatan yg terkait, dengan model organisasi AHC terpisah. Anggota dari AHC tersebut harus memiliki visi dan misi yang sama yaitu meningkatkan kualitas outcome dari lulusan tenaga kesehatan. Selain itu setiap universitas yang tergabung dalam AHC harus memiliki pimpinan institusi yang tergabung dalam

AHC yang bertanggung jawab atas perubahan mind set para mahasiswa, dosen, pakar pendidikan, pakar penelitian, para dokter spesialis di institusi pendidikan masing masing (Dirjen Dikti 2013).

Muhammadiyah merupakan salah satu lembaga pendidikan islam yang bercorak modern. Lembaga ini didirikan oleh Ahmad Dahlan dengan struktur organisasi vertical yang bertujuan mencerdaskan umat Islam melalui pendidikan. Struktur organisasi vertikal tersebut diantaranya pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang dan pimpinan ranting. Selain itu terdapat struktur organisasi horizontal yang menaungi berbagai bidang. Terdapat juga Amal Usaha Muhammadiyah dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah amal usaha dalam bidang kesehatan dan pendidikan (Pujodjokusumo 1998).

Dari uraian di atas konsep AHC dapat diterapkan di organisasi muhammadiyah yang memiliki ketiga unsure dari AHC yaitu university community, teaching hospital, dan practice plan. University community dari cukup banyak tersebar di Indonesia di antaranya UMY, UMM, UMS dsb. Teaching hospital adalah rumah sakit milik muhammadiyah yaitu RS PKU Muhammadiyah. Kemudian yang berperan sebagai practice plan adalah MPKU.

Salah satu perguruan tinggi di bawah nama Muhammadiyah adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Fakultas Kedokteran dan

Ilmu Kesehatan (FKIK UMY) yang terdiri dari program studi Pendidikan Dokter, Kedokteran Gigi, Keperawatan, dan Farmasi. Visi dari FKIK UMY yaitu “Menjadi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang mandiri, bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*) berakar pada sosio-budaya Indonesia yang Islami serta berdasar kedokteran berbasis bukti berkualitas nasional, regional bahkan Internasional.” FKIK UMY berkomitmen untuk menghasilkan tenaga medis yang berwawasan global serta berjiwa diri (sosio budaya) kebangsaan. Secara khusus di FKIK UMY telah diterapkan dan dikembangkan konsep kedokteran keluarga (dan komunitas) yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan.

Saat ini FKIK UMY menghadapi berbagai tantangan yang perlu ditindaklanjuti segera sesuai dengan perkembangan era globalisasi. Langkah FKIK UMY yaitu berupa upaya menggalang kerjasama dengan institusi yang mendukung kemajuan sivitas akademiknya baik dalam maupun di luar negeri untuk sehingga dapat menjadi akademika yang berwawasan global, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan.

Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) merupakan standar kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh lulusan dokter di Indonesia. SKDI sejak pertama ditetapkan dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) pada tahun 2006 dan sampai sekarang digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum dalam pendidikan

kedokteran yaitu kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Selain itu, SKDI menjadi standar dalam penyusunan materi uji kompetensi dokter yang sifatnya nasional. Berdasarkan pengalaman institusi pendidikan kedokteran dalam mengimplementasikan SKDI, hal yang perlu diperhatikan antara lain : 1) SKDI harus mampu beradaptasi dengan derajat pembangunan kesehatan di Indonesia selama kurun waktu 5 tahun ke depan, dan sampai dengan tahun ini, *Millenium Development Goals* (MDGs) belum dapat dicapai dengan baik. 2) Profesi pendidikan dokter masih memerlukan perhatian khususnya dalam aspek perilaku profesional, mawas diri, dan pengembangan diri serta komunikasi efektif sebagai pondasi kompetensi dokter Indonesia, 3) Penambahan Daftar Masalah Profesi pada Lampiran Daftar masalah, sebagai tindak lanjut hasil analisis terhadap perilaku dokter secara individual. 4) Pengembangan Lampiran Pokok Bahasan untuk Pencapaian 7 Area Kompetensi, sebagai pelaksanaan hasil analisis mengenai penerapan SKDI di institusi pendidikan dokter. 5) Konsistensi lampiran daftar masalah, penyakit dan keterampilan klinis disusun berdasarkan sistem organ. 6) Agar SKDI dapat diimplementasikan secara konsisten oleh institusi pendidikan kedokteran, maka berbagai sumber daya manusia dan fasilitas seperti dosen, tenaga pengajar, sarana dan prasarana serta pendanaan yang menunjang seluruh kegiatan pembelajaran perlu

disiapkan secara efektif dan efisien serta disesuaikan dengan kebijakan (Konsil Kedokteran Indonesia 2012).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktek Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer disebutkan bahwa ,”mewujudkan tenaga kesehatan yang berkualitas, negara sangat membutuhkan peran organisasi profesi tenaga kesehatan yang memiliki peran menjaga kompetensi anggotanya.”

Bagi dokter, terdapat organisasi profesi yaitu Ikatan Dokter Indonesia yang mendapat amanah untuk menyusun standar profesi bagi seluruh anggotanya, dimulai dari standar etik (Kode Etik Kedokteran Indonesia – KODEKI), standar kompetensi yang menjadi standar minimal yang harus mampu dilakukan oleh setiap dokter ketika selesai menempuh pendidikan dokter, kemudian disusul oleh Standar Pelayanan Kedokteran yang harus dikuasai ketika berada di lokasi pelayanannya, terdiri atas Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran dan Standar Prosedur Operasional.

Standar Pelayanan Kedokteran adalah panduan dalam praktek yang mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI). Dalam rangka penjaminan mutu pelayanan, dokter wajib mengikuti kegiatan

Pendidikan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) dalam naungan IDI (Permenkes 2014).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana Peran FKIK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terhadap Persiapan SDM dengan Konsep *Academic Health Center* (AHC)?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

### **1. Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran MPKU Wilayah Yogyakarta, peran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan RS PKU Muhammadiyah terhadap mutu pelayanan klinik rumah sakit dengan konsep AHC.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui peran Institusi Pendidikan Kedokteran khususnya FKIK UMY yang dapat diwujudkan dalam konsep AHC.
- b. Mengetahui peran dokter dari FKIK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai dokter pendidik bagi mahasiswa calon dokter umum di pusat pelayanan kesehatan.
- c. Mengetahui persiapan dari Sumber daya Manusia di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam upaya mendistribusikan mahasiswa dalam

menjalani masa asisten di pusat pelayanan kesehatan berdasarkan konsep AHC.

- d. Mengetahui implementasi konsep AHC yang telah dilakukan dari FKIK UMY dalam menyiapkan lulusan UMY yang bermutu

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang penerapan konsep AHC di Muhammadiyah.
2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperkuat kerja sama antar institusi terkait sesama Muhammadiyah dalam mewujudkan konsep AHC.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan dari manajemen antar institusi terkait Muhammadiyah
4. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi system pendidikan tenaga kesehatan di Indonesia khususnya di lingkungan Muhammadiyah.